

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai hutan tropis dengan luas terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire, sehingga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan agar tetap dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia. Fungsi hutan menurut Suparmoko (1997) di antaranya adalah mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah; menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi; melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik; memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata; serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional

Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi yang dapat dikonversi (20,88 juta ha) Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6 % dari total luas daratan Indonesia sehingga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang rawan terjadi kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia tahun 2012 mencapai 0,45 terbagi menjadi kerusakan kawasan hutan 0,32 dan di luar kawasan hutan 0,13 per tahun. (Kementerian Kehutanan, 2012)

Kerusakan lahan dan hutan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang perlu penanganan serius dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, LSM, Akademisi dan lainnya. Faktor-faktor penyebab rusaknya hutan dan meluasnya lahan kritis diantaranya yaitu pembalakan liar, kebakaran

hutan, ataupun alih fungsi lahan sebagai akibat dari desakan ekonomi masyarakat terutama di sekitar hutan.

Kementerian Kehutanan telah menetapkan program-program prioritas untuk mengatasi kerusakan hutan dan meluasnya lahan kritis, antara lain: pemberantasan *illegal logging*, revitalisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan pemantapan kawasan hutan. Program pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu: meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan di dalam hutan (Darusman dan Hardjanto,2006) Program-program untuk mengatasi meluasnya lahan kritis telah dilakukan terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat di sekitar hutan seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), *Social Forestry* (Pengembangan hutan Rakyat/HR, Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Desa/HD), serta Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan/AUK (Rotan, Madu, Sutera Alam). Salah satu pola rehabilitasi lahan kritis secara vegetasi adalah dengan membangun hutan rakyat. Melalui pembangunan hutan rakyat akan terjadi peningkatan produktivitas lahan serta menunjang konservasi tanah dan air (Andayani, 1995)

Potensi hutan rakyat di Indonesia sangat besar, meliputi 1.271.505,61 ha, dengan jumlah perkiraan tegakan di dalamnya sebanyak 42.965.519 pohon (Sahadat dan Sabarui,2008). Adapun jenis tanaman yang paling banyak ditanam di hutan rakyat, diantaranya adalah Tanaman Kayu-Kayuan seperti Sengon (*albizia falcataria*), Mahoni (*swietenia macrophylla*), Jati (*tectona grandis*), Akasia (*acacia mangium*), Sonokeling (*dalbergia latifolia*), Gamal (*inocarpus edulis*), Mindi (*melia azadararah*), Cemara (*causuarina equisetifdia*) dan Tanaman MPTS (Multi Purposes Trees Species) seperti Pete (*parkia speciosa*), Nangka (*artocarpus integra*), (Suren (*toona sureni*), Mangga (*mangifera indica*), Melinjo (*gnetum gnemon*), Kelapa (*cocos nicifera*), Kemiri (*aleurites moluccana*), Pinang (*casearia coriacea*), Mete (*daemonorops niger*), Rambutan (*nephelium*

lappaceum), Durian (*durio ziberthinus*), Bambu (*gigancochloa apus*), Sungkai (*heterophrogma macrolobum*), Karet (*ficus elastica*), Kopi (*abelmoschus esculentus*), Kapuk (*ceiba pentandra*), Ampupu (*ecalyptus urophylla*), Johar (*cassia siamea*), Cempedak (*artocarpus champeden*), Angsana (*pterocarpus indica*), Nyatoh (*palaquium javense*), Enau (*arenga pinnata*), Asam (*tamarindus indica*), Kaliandra (*calliandra calothygisis*), Matoa (*pometia pinnata*) dan Sonokrit (*dalbergia sisso*). (Sahadat dan Sabarudi, 2008)

Karakter hutan rakyat di Jawa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hutan rakyat yang murni ditanami kayu-kayuan; hutan rakyat yang ditanami kayu dan buah-buahan; dan hutan rakyat yang ditanami kayu, buah-buahan dan empon-empon. (Jariyah dan Wahyuningrum, 2008)

Hutan rakyat memiliki peluang dan potensi yang sangat besar dalam memajukan industri kehutanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas lahan, dan menjaga kesuburan tanah serta tata air. (Priyambodo, 2010) Produktivitas hutan rakyat di pulau Jawa rata-rata 2,29 m³/ha/tahun atau lebih dari tiga kali lipat produktivitas hutan Perhutani (hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani di Jawa) yaitu 0,73 m³/ha/tahun (Arupa, 2011)

Selain memiliki fungsi ekologis, hutan rakyat juga berfungsi sosial dan ekonomi. Hutan Rakyat di Jawa berpotensi memasok bahan baku kayu sampai 40% dari kebutuhan nasional yang kini mencapai 43 juta meter kubik per tahun. Dengan potensi produksi sampai 16 juta meter kubik per tahun, kontribusi hutan rakyat di Jawa yang luasnya mencapai 2.799.181 ha cukup signifikan terhadap kebutuhan kayu nasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, Santoso dan Suprpto (2008) di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa pembangunan hutan rakyat di daerah tersebut selain untuk mengatasi lahan kritis dan kosong, juga memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat melalui produksi kayu, pendirian koperasi, serta pengembangan ternak dan pakan ternak. Secara sosial diketahui adanya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat, terbentuknya kelompok tani yang menjadi wadah/sarana penyuluhan dan sosialisasi program kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi hutan rakyat dalam

pengembangan ekonomi serta partisipasi masyarakat juga dapat dilihat pada hasil penelitian Warsiyah (2009) pada tiga desa di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Desa Glagaharjo dari penghasilan hutan rakyat sebesar Rp. 7.106.087 /tahun, Desa Kepuharjo sebesar Rp. 6.390.000 / tahun, dan Desa Wukirsari sebesar Rp. 5.838.260 /tahun. Pengaruh hutan rakyat pada pengembangan tanaman campuran seperti tanaman kayu dan empon-empon juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Hasil penelitian Kusumedi dan Jariyah (2010) menunjukkan bahwa hasil dari kedua produk hutan rakyat memberikan sumbangan pendapatan untuk jangka pendek (harian) atau jangka panjang (tabungan) atau berkelanjutan.

Kajian persepsi, partisipasi dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan maupun pelestarian hutan telah banyak dilakukan pada kawasan hutan konservasi seperti cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa maupun kawasan lindung. Kajian persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Suaka Margasatwa dilakukan oleh Saragih (2011) di Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang fungsi kawasan tersebut yaitu sebagai pencegah erosi, penyerap karbon, dan tempat untuk menangkap ikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya masih bersifat konsultatif dimana saran mereka didengar oleh pihak pengelola tetapi tidak dipakai dalam penyusunan rencana pengelolaan, sehingga akses masyarakat untuk mendapat manfaat langsung dari kawasan belum dapat dirasakan.

Hasil penelitian Umar (2010) mengenai persepsi dan perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air, menunjukkan budidaya eksisting di kawasan Hutan Penggaron menimbulkan gangguan fungsi hutan Penggaron sebagai daerah resapan air. Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Terkait kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat tidak memiliki persepsi tentang kaidah hukum pengelolaan hutan. Kemudian terkait kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka bukan bagian lembaga pengelola hutan sehingga tidak terikat aturan lembaga

pengelola hutan. Terkait hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, persepsi masyarakat sangat terkait dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan hutan dan tidak dalam koridor hukum yang mengatur tentang hutan. Terkait perilaku (aktivitas) masyarakat, masyarakat cenderung melakukan aktivitas budidaya di kawasan lindung (hutan). Dukungan aksesibilitas dan infrastruktur perumahan di kawasan Hutan Penggaron berdampak terhadap terbukanya peluang kawasan Hutan Penggaron sebagai kawasan yang bernilai ekonomi sehingga tidak lagi merupakan kawasan yang terisolir (berfungsi utama sebagai kawasan lindung).

Adapun persepsi dan perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat perlu dikaji lebih lanjut karena keberadaan hutan rakyat yang didirikan di atas tanah milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat mandiri. Masyarakat memiliki hak penuh terhadap pengelolaan hutan rakyat yang mereka kembangkan. Hutan rakyat di Desa Karangrejo dibangun secara swadaya oleh masyarakat sejak tahun 1964 dan sampai sekarang masih tetap ada dan dilestarikan.

1.2 Rumusan Masalah

Pelestarian hutan rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo menjadi salah satu upaya konservasi sumber daya alam terutama tanah, air serta vegetasi. Perlu diketahui mengapa masyarakat tetap melestarikan hutan rakyat, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka melakukannya serta bagaimana mereka melakukannya.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana persepsi masyarakat dalam upaya pelestarian Hutan Rakyat Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat masyarakat dalam upaya pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditetapkanlah tujuan dari penelitian ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkaji persepsi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo
2. Mengkaji perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo
3. Mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Masyarakat yaitu agar dapat meningkatkan upaya dalam melestarikan hutan rakyat
- b. Bagi instansi terkait adalah agar menjadi bahan masukan dan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo
- c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan

1.5. Orisinalitas Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada 3 (aspek) yaitu persepsi dan perilaku masyarakat, pelestarian hutan rakyat, dan faktor pendukung dan penghambat pelestarian hutan rakyat. Rekomendasi yang dirumuskan ditujukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Penelitian yang relevan dan menjadi referensi mencakup penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut :

1.6. Kerangka Pemikiran



